



RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2026







PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS TENAGA KERJA

Jalan RA Kartini Nomor 160, Sragen, Jawa Tengah
Telepon (0271) 890645, Laman disnaker.sragenkab.go.id
Pos-el disnaker@sragenkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RENCANA KERJA
TAHUN 2026

*

*

*

*

*

*

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Sragen, 03 Juli 2025
Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS TENAGA KERJA

Agus Winarno, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710313 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
LAMPIRAN vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9
BAB II 10
HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA 10
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU 10
2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan* 10
Capaian Renstra 10
2.2. *Analisis* Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31
2.3. *Isu*-isu Penting Penyelenggaraan Tusi Perangkat Daerah 35
2.4. Review terhadap Rencana kerja RKPD 36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 50
BAB III 51
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA 51
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 51
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja 53
3.3. Program dan Kegiatan 54
BAB IV 59
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA 59
BAB V 68
PENUTUP 68

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN 18
TABEL 2. 2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN DUA TAHUN SEBELUMNYA 32
TABEL 2. 3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 33
TABEL 2. 4 REVIEW TERHADAP RECANA KERJA RKPD TAHUN 2026 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN 38
TABEL 2. 5 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2026 UPTD GANESHA TECHNOPARK SUKOWATI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN 49
TABEL 2. 6 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 50
TABEL 3. 1 TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA 54
TABEL 4. 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN SRAGEN 59

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026.

Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Nomor 675/ 6281 tentang Perubahan Alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), salah satunya adalah dengan cara mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), atau lebih memfokuskan pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun mendatang agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, setiap Perangkat Daerah harus berperan aktif, termasuk dalam hal menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang lebih baik, maka sangat diperlukan suatu dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik yang kinerjanya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah, dengan tahapan di dalamnya termasuk penyusunan Rencana kerja Renja Perangkat Daerah.

1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

   Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan / Rencana Kerja Pemerintah(RKP).

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi. Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan stakesholders atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholders di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan rencana strategis, sesuai dengan tugas pokoknya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024, dan hasil evaluasi proyeksi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

3. Keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dan penetapan

Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang merupakan dasar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 sesuai dengan landasan-landasan hukum yang terkait.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 ini merupakan tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, terdapat indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja serta indikator kinerja penunjang yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran yang mendukung misi keempat “Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja” yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan sasaran ke 4.2 yaitu “Menurunnya Angka Pengangguran”.

Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2026. Didalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2026, dirumuskan tujuan jangka menengah yaitu “Meningkatnya Pengurangan Pengangguran”. Hal ini selaras dengan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen, yaitu dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sragen. Disamping itu, Renja yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana

Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, antara lain mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekrerja Migran Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagian telah diubah sebagian dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 32/ MEN/ XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16 / MEN /2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
20. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).
23. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahun 2026 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen jangka pendek yaitu dalam jangka 1 (satu) tahun;
3. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten Sragen dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Renja Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen;
4. Mewujudkan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen;
5. Menentukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi acuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan RKPD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen selama tahun 2026;

3. Menjadi pedoman monitoring dan evaluasi pencapaian target Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan;
4. Mewujudkan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rencana kerja RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra*

Penyusunan Rencana kerja Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana kerja Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tahun sebelumnya, yang disandingkan dengan pencapaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Rencana kerja Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024.

Pada Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebagaimana tertuang di dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.109.619.310 (sebelas milyar seratus sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.263.751.655 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 92,38 %.

1. **Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

   Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tersebut, tidak ada program/kegiatan yang capaian kinerjanya tidak sesuai dengan target.

2. **Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

   Dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja di Tahun 2024, terdapat beberapa program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, antara lain:

   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - 1.6 Peningkatan Pelayanan BLUD
   2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
      - 2.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
   3. Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
      - 3.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
      - 3.2 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
      - 3.3 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
      - 3.4 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

   4.1 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Hubungan Industrial

   5.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

   5.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

   6.1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

7. **Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Pada tahun 2024, terdapat sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dengan capaian kinerja melebihi target, yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   1.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2. Program Penempatan Tenaga Kerja

   2.1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

   2.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

   2.3 Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota

4. **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Program/ Kegiatan yang Terpenuhi, diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan perencanaan awal, selain itu kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

   Sedangkan untuk Program Perencanaan Tenaga Kerja, meliputi kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Kegiatan tersebut di tahun 2024 terlaksana sesuai perencanaannya, didukung dengan adanya sumber dana dan sumber daya manusia yang baik dalam pelaksanaannya.

   Sedangkan untuk Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, meliputi kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan tersebut di tahun 2024 terlaksana sesuai perencanaannya, didukung dengan adanya sumber dana dan sumber daya manusia yang baik dalam pelaksanaannya.

   Sedangkan untuk Program Penempatan Tenaga Kerja, meliputi kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut di tahun 2024 terlaksana sesuai perencanaannya, didukung dengan adanya sumber dana dan sumber daya manusia yang baik dalam pelaksanaannya.

   Sedangkan untuk Program Hubungan Industrial, meliputi kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian

Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut di tahun 2024 terlaksana sesuai perencanaannya, didukung dengan adanya sumber dana dan sumber daya manusia yang baik dalam pelaksanaannya.

Sedangkan untuk Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, meliputi kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut di tahun 2024 terlaksana sesuai perencanaannya, didukung dengan adanya sumber dana dan sumber daya manusia yang baik dalam pelaksanaannya.

2) Program/ Kegiatan yang melebihi target di Tahun 2024 antara lain Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

   Program Penempatan Tenaga Kerja yaitu kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.

   Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja didukung oleh sub Kegiatan Job Fair. Pada tahun 2024, pelaksanaan Job Fair yang diadakan pada tanggal 14-15 Agustus 2024, di ikuti oleh 45 perusahaan baik perusahaan didalam kota maupun luar kota Sragen, dengan pengunjung sebanyak 3.501 orang berhasil menempatkan sebanyak 1.332 orang dari target penempatan sebanyak 500 orang.

Sedangkan kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota, didukung oleh sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran. Dalam sub kegiatan ini terdapat 2 bentuk kegiatan yaitu penanganan kasus dan penyediaan rekomendasi paspor bagi Calon Pekerja Migran. Penanganan kasus terkait Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Sedangkan untuk rekomendasi paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mencari rekomendasi paspor bekerja keluar negeri sebanayak 1.626 orang.

Sedangkan untuk Program Hubungan Industrial, pencapaian kegiatan melebihi target, didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota. Kedua kegiatan ini didukung oleh adanya perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama di tahun 2024 sesuai target yang direncanakan. Pada tahun 2024 direncanakan penyusunan perjanjian kerja bersama ini sebanyak 2 perusahaan. Selain itu, juga didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Opersional Lembaga Kerjasama Tripartit. Pada tahun 2024, direncanakan pembinaan dilakukan kepada 30 lembaga.

5. **Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra**

Capaian dari sub kegiatan-sub kegiatan yang belum memenuhi target berimplikasi pada hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja menetapkan target yang harus dicapai yaitu 71,24 %. Sedangkan di Tahun 2024, tingkat capaian TPAK tercapai 74,54 % dengan tingkat capaian sebanyak 104,63 %.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021- 2026 yang telah ditetapkan, yaitu nilai TPAK sebanyak 72,74 %. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2024 tingkat capaian yang berhasil dicapai adalah sebesar 102,47 % dari target IKU di akhir Renstra.

6. **Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan**

   Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja dan mengatasi faktor-faktor faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

   1) Dalam perencanaan target kinerja, diupayakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
   2) Kebijakan perencanaan dan penganggaran seharusnya berbasis kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Utama, sehingga perencanaan anggaran lebih terarah dalam mendukung tujuan-tujuan pembangunan;
   3) Meningkatkan pemahaman dasar tentang dokumen perencanaan baik dari tingkat pemangku kebijakan tertinggi sampai pelaksana teknis kegiatan, sehingga dokumen perencanaan tidak dianggap hanya sebagai kelengkapan administratif saja agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat lebih terukur dan jelas;
   4) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, perhatian utama bukan hanya pada proses dan penyerapan/pencairan anggaran, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor-faktor penting dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja untuk menghindari permasalahan seperti:
      a) Fokus kinerja tidak sesuai dengan indikator kinerja utama;
      b) Target kinerja tidak berorientasi pada hasil/outcome;
      c) Dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya tidak konsisten;
      d) Cascading yang tidak tepat;

e) Indikator kinerja tidak dapat diukur secara obyektif dan tidak relevan;
f) Data capaian kinerja yang tidak konsisten sehingga mengakibatkan penentuan target kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Tabel 2. 1 (Tabel T-C.29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah(%)**	100	100	100	100	100	100	300	300 %
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(%)	100	100	100	100	100	100	300	300 %
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah(dokumen)	5	5	5	5	100	5	15	300 %
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(persen)**	100	100	100	100	100	100	300	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang/bulan)	58	68	48	48	100	58	174	300%
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah(persen)**	100	100	100	100	100	100	300	300%
2	07	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(paket)	1	1	1	1	100	1	3	300 %
2	07	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)	1	1	1	1	100	1	3	300%
2	07	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	1	1	1	1	100	1	3	300%
2	07	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	1	1	1	1	100	1	3	300%
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	12	1	12	12	100	12	25	208,33%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	12	1	12	12	100	12	25	208,33%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(persen)**	100	100	100	100	100	100	300	300%
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	1	1	1	1	100	1	3	300%
2	07	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan (laporan).	12	1	12	12	100	12	25	208,33%
2	07	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(laporan)	12	1	12	12	100	12	25	208,33%
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(persen)**	100	100	100	100	100	100	300	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(unit)	45	45	45	45	100	45	135	300%
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi(unit)	1	1	2	2	100	1	4	400%
2	**07**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Prosentase Capaian Standart Pelayanan Minimal(persen)**	100	100	100	100	100	100	300	300%
2	07	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan(unit)	1	1	1	1	100	1	3	300%
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun(persen)**	100	100	80	80	100	100	280	280%
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Prosentase Lembaga / Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	70	12,5	65	65	100	70	147,5	210,71%
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro(dokumen)	1	1	1	1	100	1	3	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro(orang)	5	5	5	5	100	5	15	300%
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI(persen)**	60	50	55	56,65	103	60	165,65	277,75%
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi(persen)	95	90	90	103,50	115	95	288,5	303,68%
2	07	03	2.01	01	Proses pelaksanaan Pendididikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n(orang)	724	700	556	724	130,22	724	2148	296,68%
2	07	03	2.01	02	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n(lembaga)	1	1	1	1	100	1	3	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(persen)**	50	50	50	50	100	50	150	300%
2	07	03	2.02	01	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina(lembaga)	60	30	30	30	100	60	120	200%
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja(persen)**	57	41	49	49	100	57	147	257,89%
2	07	03	2.03	01	Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi(perizinan)	5	5	5	5	100	5	15	300%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil(persen)**	100	100	100	100	100	100	300	300%
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas(perusahaan)	40	50	41	41	100	40	131	327,5%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota(persen)**	10	10	10	10	100	10	30	300%
2	07	03	2.05	01	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah(dokumen)	1	1	1	1	100	1	3	300%
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja(persen)**	68,76	64,81	66,75	102,12	152,99	68,76	235,69	342,77%
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja(persen)**	100	100	100	120,75	120,75	100	320,75%	320,75%
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL(orang)	40	120	40	40	100	40	200	500%
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan(orang)	500	500	500	500	100	500	1.500	300%
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD(orang)	100	200	100	183	183	100	403	483%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja(orang)	16	16	10	10	100	16	42	262,5%
2	**07**	**04**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(persen)**	100	100	100	100	100	100	300	300%
2	07	04	2.02	01	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi(lembaga)	12	12	12	12	100	12	36	300%
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku(lembaga)	30	72	15	15	1000	30	117	390%
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja(persen)**	100	100	100	217,11	217,11	100	417,11	417,11 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online(dokumen)	12	12	12	12	100	12	36	300%
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)(orang)	1500	5000	1500	4274	284.93	1500	10774	718,26%
2	07	04	2.03	03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja(orang)	500	500	500	1332	266.40	500	2332	466,4%
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI**	100	100	100	175	175	100	375	375%
2	07	04	2.04	01	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan(orang)	10	16	10	10	100	10	36	360%
2	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani(orang)	500	500	500	1626	325.20	500	2626	525,2%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan(orang)	10	10	10	10	100	10	30	300%
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP(persen)**	85	75	80	80	100	85	240	282,35%
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjajanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota**	**Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)(persen)**	40	40	40	40	100	40	120	300%
2	07	05	2.01	01	Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online(perusahaan)	5	5	5	5	100	5	15	300%
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama(perusahaan)	2	2	2	2	100	2	6	300%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (laporan)	25	70	25	25	100	25	120	480%
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial (persen)**	100	100	100	100	100	100	300	300%
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (perkara)	25	25	25	25	100	25	75	300%
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan(perkara)	25	25	25	25	100	25	75	300%
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afillasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi(asosiasi dan SP)	15	74	10	10	10	15	99	660%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina(lembaga)	30	30	30	100	333,33	30	160	533,33%
2	07	05	2.02	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja(orang)	100	100	100	100	100	100	300	300%
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
3	**32**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigran yang ditempatkan(persen)**	100	100	100	100	75	100	300	300%
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigrasi(persen**	100	100	100	100	75	100	300	300%
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota(laporan)	2	2	1	1	100	1	4	500%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan (KK)	1	2	1	1	100	1	4	400%

KETERANGAN :

n : Tahun perencanaan (2026)

Sragen, 03 Juli 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen

Agus Winarno, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19710313 199803 1 008

2.2. *Analisis* Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen pada tahun 2021– 2026 menentukan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator tujuan penunjang, indikator sasaran penunjang, dan indikator program yang terkait dengan kinerja pelayanan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	**:**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**
Indikator Sasaran	:	Tingkat produktivitas tenaga kerja
Indikator Tujuan Penunjang	:	Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Penunjang	:	Predikat kinerja SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

2.2.1 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun Sebelumnya

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DENGAN DUA TAHUN SEBELUMNYA

NO		TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2022			2023			2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1		Tujuan strategis: Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	69,92	69,40	99,25	70,24	68,60	97,66	71,24	74,54	104,63
2		Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang siap kerja	Tingkat Produktivitas tenaga kerja (Rp/Perkapita)	8,250	6,149	74,53	8,251	5,840	70,77	8,252	6,631	80,35
3		Sasaran Penunjang: Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	70,20 (BB)	65,52 (B)	93,33	70,30 (BB)	68,60 (B)	97,58	70,40 (BB)	69,45 (B)	98,65 (B)

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024 dibanding dengan dua tahun sebelumnya. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya, analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persentase capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 97,66 % lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 99,25 %. Sedangkan di tahun 2024, pencapaian kinerjanya meningkat sebesar 104, 63 % dengan kenaikan sebesar 6,97 %.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran strategis yaitu Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, terjadi kenaikan kinerja. Pada tahun 2022 pencapaian kinerja sebesar 74,53 %, sedangkan ditahun 2023 realisasi capaian kinerja sebesar 70,77 % dan di tahun 2024 realisasi capaian kinerja sebesar 80,35 %. Terjadi penurunan dan kenaikan realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategis

dari tahun ke tahun.

Perbandingan kinerja capaian realisasi indikator sasaran penunjang yaitu predikat SAKIP dari tahun 2023 sebesar 68,60 (B), mengalami kenaikan di tahun 2024 yaitu menjadi 69,45 (B).

2.2.2 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 2. 3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

NO		TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENSTRA			
				TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1		Tujuan strategis: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	72,54 %	74,54 %	102,75 %	SANGAT BAIK
2		Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang siap kerja	Tingkat Produktivitas tenaga kerja (Rp/Perkapita)	8,254 Milyar Rupiah	6,631 Milyar Rupiah	80,33 %	AKAN TERCAPAI
3		Sasaran Penunjang: Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	70,60 (BB)	69,45 (B)	98,37 %	BAIK

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan target Akhir Renstra tahun 2026. Target akhir renstra bukanlah target komulatif, sehingga kondisi yang akan dihitung adalah kondisi pada akhir renstra/tahun 2026. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di

atas dapat disimpulkan dari sudut pandang organisasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sudah berada pada jalur yang tepat (*on the right track*) untuk mencapai target akhir renstra.

Dinas Tenaga Kerja sebagai organisasi perangkat daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut,Dinas Tenaga Kerja didukung dengan adanya 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan UPTD Ganesha Technopark Sukowati, yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat dengan 17 instruktur.

Dalam upaya mengurangi pengangguran dilakukan pelatihan tenaga kerja yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ganesha Technopark Sukowati Sragen di Tahun 2024. UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2024, melaksanakan pelatihan kepada 240 orang. Sedangkan UPTD Ganesha Technopark Sukowati Sragen di Tahun 2024 memberi pelatihan kepada 200 orang. Selain pelatihan yang dilakukan oleh UPTD BLK maupun UPTD Ganesha Technopark Sukowati, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen juga memberikan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan tuntas kemiskinan (tumis), pelatihan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kepada 256 orang.

Sesuai dengan data pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja tahun 2024, yaitu pencari kerja yang mencari kartu kuning sebanyak 7.144 orang. Dari jumlah tersebut di tahun 2024, tenaga kerja yang berhasil ditempatkan sebanyak 6.485 orang. Penempatan di tahun 2024 ini terdiri dari penempatan AKL (antar kerja lokal), AKAD (antar kerja antar daerah), dan AKAN (antar kerja antar negara). Pada Tahun 2024, tenaga kerja AKAN tersebut, yang biasa disebut dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang melakukan pendaftaran rekomendasi paspor di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 3.088 orang dengan tujuan berbagai negara. Hal ini lebih

banyak jika dibanding tahun 2023, yaitu sebanyak 2.871 orang. Penempatan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sragen ini tidak terlepas dari peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dan pelaksanaan Job Fair yang dilaksanakan. Data BKK yang dibina oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen di tahun 2024 sebanyak 46 lembaga. Selain BKK yang dibina juga terdapat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina. Pada tahun 2023 terdapat 65 LPK di Kabupaten Sragen, dan ditahun 2024 LPK yang ada di Kabupaten Sragen sebanyak 70 LPK.

Berdasarkan informasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk Kabupaten Sragen dalam Angka tahun 2025, mengenai rincian angkatan kerja di Kabupaten Sragen, terdapat total angkatan kerja sebanyak 595.184 jiwa dan total bukan angkatan kerja sebanyak 203.242 jiwa. Sementara itu, total penduduk yang berada di usia kerja mencapai 798.426 jiwa, dengan jumlah orang yang bekerja dalam usia kerja sebanyak 574.192 jiwa. Di sisi lain, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sragen tercatat sebesar 3,53 persen atau setara dengan 20.992 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 14.532 orang dan perempuan sebanyak 6.460 orang.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen juga melak ukan pembinaan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Sragen dalam upaya mengurangi perselisihan yang terjadi. Jumlah perusahaan terdaftar, baik perusahaan kecil, sedang dan besar terdaftar di tahun 2024 sebanyak 562 perusahaan. Dari perusahaan tersebut, sebanyak 118 perusahaan telah menerapkan tata kerja kelola yang layak. Perselisihan yang dapat diselesaikan baik perselisihan hak pekerja maupun kepentingan yang diselesaikan baik secara mediasi maupun bipartit sebanyak 13 perselisihan.

2.3. *Isu*-isu Penting Penyelenggaraan Tusi Perangkat Daerah

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Sragen masalah yang sering dihadapi adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industri kecil dan sektor UMKM.

Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas

yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan urusan tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Sragen. Isu-isu terkait ketenagakerjaan diantaranya adalah:

1. Rendahnya peningkatan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing dalam dunia kerja.
2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, etos kerja dan kedisiplinan tenaga kerja.
3. Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sektor informal/usaha rumahan.
4. Rendahnya animo Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk melakukan akreditasi sehingga mutu LPK diragukan
5. Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
6. Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
7. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan.
8. Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja.
9. Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan.
10. Rendahnya jumlah penempatan calon transmigran ke daerah tujuan transmigrasi dibandingkan animo calon transmigran.

2.4. Review terhadap Rencana kerja RKPD

Rencana kerja Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 disusun berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang merupakan dokumen perencanan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD Kabupaten Sragen. Dalam Rencana kerja RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen mengusulkan untuk melaksanakan 6 (enam) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub

kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 12.924.032.691,00 (Dua belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan sumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan BPHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) . Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen juga membawahi UPTD Ganesha Technopark Sukowati Sragen, dimana UPTD Ganesha Technopark Sukowati di tahun 2026 mengusulkan untuk melaksanakan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan yang mengelola anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 2. 4 (Tabel TC-31)
REVIEW TERHADAP RECANA KERJA RKPD TAHUN 2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2							**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	07						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
2	**07**	**01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.909.578.426	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	9.020.839.441	
2	**07**	**01**	**2.01**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	2.745.500	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	2.745.500	
2	07	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.745.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokmen	2.745.500	
2	**07**	**01**	**2.02**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Disnaker	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.318.492.428	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Disnaker	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.429.754.443	
2	07	01	2.02	01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	7.318.492.428	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang /bulan	7.429.754.443	
2	**07**	**01**	**2.06**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Disnaker	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	117.778.400	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Disnaker	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100 %	107.777.400	
2	07	01	2.06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	10.867.000	Penyediaan komponen instalasi listrik	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	10.866.000	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							/penerangan bangunan kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			/penerangan bangunan kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
2	07	01	2.06	02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	33.471.400	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	23.471.400	
2	07	01	2.06	04			Penyediaan bahan logistik kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	19.645.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	19.645.000	
2	07	01	2.06	05			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.272.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.272.000	
2	07	01	2.06	09			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	34.500.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	34.500.000	
2	07	01	2.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	9.023.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	9.023.000	
2	**07**	**01**	**2.08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.189.169.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.189.169.000	
2	07	01	2.08	02			Penyediaan jasa komunikasi dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	470.000.000	Penyediaan jasa komunikasi dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	470.000.000	
2	07	01	2.08	03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	10.626.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	10.626.000	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	01	2.08	04			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	708.543.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	718.543.000	
2	**07**	**01**	**2.09**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	**281.393.098**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	**281.393.098**	
2	07	01	2.09	02			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	188.210.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	190.213.098	
2	07	01	2.09	09			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	93.183.098	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	91.180.000	
2	**07**	**02**					**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Disnaker	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**	100 %	23.930.000	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Disnaker	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**	100 %	23.927.000	
2	**07**	**02**	**2.10**				**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Disnaker	Prosentase Lembaga / Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	70 %	23.930.000	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Disnaker	Prosentase Lembaga / Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	65%	23.927.000	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	02	2.10	01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	14.773.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	14.770.000	
2	07	02	2.10	02			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 orang	9.157.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 orang	9.157.000	
2	07	03					**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Disnaker	Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI	60 %	1.914.706.302	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Disnaker	Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI	60 %	**3.455.136.300**	
2	07	03	2.01				**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	95 %	1.832.543.752	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	95 %	3.455.136.300	
2	07	03	2.01	01			Proses pelaksanaan Pendididikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab Sragen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	724 orang	1.827.856.552	Proses pelaksanaan Pendididikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab Sragen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	464 orang	3.372.973.900	
2	07	03	2.01	02			Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Disnaker	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 lembaga	4.687.200	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Disnaker	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 lembaga	4.687.100	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**07**	**03**	**2.02**				**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Disnaker	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swast	50 %	13.103.900	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Disnaker	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swast	50 %	13.000.000	
2	07	03	2.02	01			Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 lembaga	13.103.900	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 lembaga	13.000.000	
2	**07**	**03**	**2.03**				**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Disnaker	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	57 %	5.031.650	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Disnaker	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	49 %	5.031.550	
2	07	03	2.03	01			Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	5.031.650	Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	5.031.550	
2	**07**	**03**	**2.04**				**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Disnaker	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 %	40.716.900	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Disnaker	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 %	40.716.900	
2	07	03	2.04	01			Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 perusahaan	40.716.900	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan	40.716.900	
2	**07**	**03**	**2.05**				**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10 %	23.414.000	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10 %	23.413.950	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	03	2.05	01			Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 dokumen	23.414.000	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 dokumen	23.413.950	
2	**07**	**04**					**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Disnaker	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	68,76 %	274.773.000	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Disnaker	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	68,76 %	274.752.000	
2	**07**	**04**	**2.01**				**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	100 %	26.405.750	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	100 %	26.404.000	
2	07	04	2.01	02			Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 orang	7.013.500	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 orang	7.013.000	
2	07	04	2.01	03			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 orang	8.550.250	Penyululuhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 orang	8.549.500	
2	07	04	2.01	04			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 orang	1.866.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 orang	1.865.000	
2	07	04	2.01	05			Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 0rang	8.976.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 orang	8.976.000	
2	**07**	**04**	**2.02**				**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)**	Disnaker	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)	100 %	9.679.000	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)**	Disnaker	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)	100 %	9.678.500	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota			**Daerah Kabupaten/Kota**		Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.02	01			Penyediaan sumber daya perizinzn LPTKS secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 lembaga	4.832.000	Penyediaan sumber daya perizinzn LPTKS secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 lembaga	4.831.500	
2	07	04	2.02	02			Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Disnaker	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 lembaga	4.847.000	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Disnaker	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 lembaga	4.847.000	
2	**07**	**04**	**2.03**				**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	198.698.500	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	198.693.000	
2	07	04	2.03	01			Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 dokumen	4.906.000	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 dokumen	4.906.000	
2	07	04	2.03	02			Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 orang	7.470.000	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 orang	7.465.000	
2	07	04	2.03	03			Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	186.322.500	Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	186.312.000	
2	**07**	**04**	**2.04**				**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100 %	39.989.750	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100 %	39.986.500	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	04	2.04	01			Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 orang	22.928.500	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 orang	22.928.000	
2	07	04	2.04	02			Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 orang	3.657.250	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 orang	3.655.500	
2	07	04	2.04	03			Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Disnaker	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 orang	13.404.000	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Disnaker	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 orang	13.403.000	
2	**07**	**05**					**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Disnaker	Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan)	85 %	109.699.150	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Disnaker	Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan)	85 %	109.697.450	
2	**07**	**05**	**2.01**				**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjajanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota**	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	40 %	23.013.600	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjajanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota**	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	40 %	23.012.800	
2	07	05	2.01	01			Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	3.838.200	Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	3.837.900	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	05	2.01	02			Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 perusahaan	2.610.400	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 perusahaan	2.610.200	
2	07	05	2.01	03			Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 laporan	16.565.000	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 laporan	16.564.700	
2	**07**	**05**	**2.02**				**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100 %	86.685.550	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100 %	86.684.650	
2	07	05	2.02	01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	13.822.050	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	13.822.050	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	05	2.02	02			Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 perkara	9.976.900	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 perkara	9.976.600	
2	07	05	2.02	03			Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afillasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 asosiasi dan Serikat Pekerja	6.404.200	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afillasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 asosiasi dan Serikat Pekerja	6.404.000	
2	07	05	2.02	04			Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30 lembaga	42.419.900	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	42.419.600	
2	07	05	2.02	05			Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	14.062.500	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	14.062.400	
3																	
3	**32**						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Disnaker				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Disnaker				
3	**32**	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	Disnaker				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	Disnaker				

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**32**	**03**	**2.01**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Disnaker	Prosesntase Transmigran yang ditempatkan	100 %	39.680.500	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Disnaker	Prosesntase Transmigran yang ditempatkan	100 %	39.680.500	
3	32	03	2.01	01			**Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigras	100 %	39.680.500	**Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigras	100 %	39.680.500	
3	32	03	2.01	04			Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	9.922.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	9.922.000	
5	**07**	**03**	**2.02**				Pemindahan dan penempatan transmigrans yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 KK	29.758.500	Pemindahan dan penempatan transmigrans yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 KK	29.758.500	

Tabel 2. 5 (Tabel TC-31)

REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2026 UPTD GANESHA TECHNOPARK SUKOWATI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2							**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	07						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					
2	**07**	**01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah			
2	**07**	**01**	**2.10**				**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Disnaker	**Prosentase capaian standart pelayanan minimal BLUD**	100%	75.000.000	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Disnaker	**Prosentase capaian standart pelayanan minimal BLUD**	100%	80.000.000	
2	07	01	2.10	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Disnaker	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	75.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Disnaker	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	80.000.000	Sumber: Pendapatan BLUD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan persiapan yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD dengan berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 disusun setelah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Dari hasil Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut hasilnya tidak ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen selaku Perangkat Daerah, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Sragen.

Tabel 2. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, *"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*. Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden; poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2020- 2024 tersebut yaitu:

a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
b. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

Upaya Kementerian Ketenagakerjaan tersebut selaras dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, yaitu dalam merumuskan tujuan jangka menengah yaitu "Meningkatnya Pengurangan Pengangguran". Sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan tersebut, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
2. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja.
6. Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Sragen yakni "***Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong***". Didalam renja tahun 2026 merupakan tahap keempat atau tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan;
4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Mengacu pada kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan juga dalam upaya mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Sragen khususnya misi ke-4 (empat), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen memuat 6 (enam) program prioritas, yaitu diantaranya:

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
4) Program Hubungan Industrial;
5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sragen , Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berkontribusi dalam pencapaian misi keempat dalam RPJMD Kabupaten Sragen yaitu "**Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja "**. Untuk Mencapai itu Dinas tenaga kerja Kabupaten Sragen berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: " **Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja.** "

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen adalah " **Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Yang Siap Kerja** ".

Tujuan, indikator tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Tujuan	:	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja
Indikator Tujuan	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang siap kerja
Indikator Sasaran	:	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, strategi yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur.
2. Peningkatan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan.
3. Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
4. Peningkatan pengawasan tentang norma ketenagakerjaan.
5. Peningkatan mitra usaha khususnya mitra tenaga kerja dalam ketenagakerjaan dan penyaluran tenaga kerja.
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Direncanakan pada tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen akan melaksanakan 6 Program, 19 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan

yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp 11.272.367.378,00 (Sebelas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**, dengan kegiatan :
    1. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
        a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
        a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
    3. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
        a) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
        b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
        c) Penyediaan bahan logistik kantor.
        d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
        e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
        f) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.
    4. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
        a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
        b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
        c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
    5. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
        a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
        b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

1. *Peningkatan Pelayanan BLUD*
    a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2) Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. *Penyusunan Rencana Tenaga Kerja*
    a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
    b) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

3) Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. *Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*
    a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
    b) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
2. *Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*
    a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
3. *Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja*
    a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.
4. *Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil*
    a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
5. *Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*
    a) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

1. *Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota*
    a) Pelayanan antar Kerja
    b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
    c) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
    d) Perluasan Kesempatan Kerja
2. *Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota*
    a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara

Terintegrasi

b) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

3. *Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*

a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

c) Job Fair/Bursa Kerja

4. *Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota*

a) Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/PMI

b) Penyediaan layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran

c) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

5) Program Hubungan Industrial

1. *Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

b) Pendaftaran Perjanjian kerjasama bagi perusahaan

c) Penyelenggaraan pendataan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja serta pengupahan.

2. *Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota*

a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

c) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
d) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
e) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Urusan Pilihan)

1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten Kota

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b) Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Sragen

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07				**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**		Kabupaten Sragen						
07	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**9.020.839.441**			**100 %**	**9.333.225.843**
07	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**100 %**	**2.745.500**	**DAU**		**100 %**	**5.000.000**
07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	2.745.500	DAU		5 dokumen	5.000.000
07	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100 %**	**7.429.754.443**	**DAU**		**100 %**	**7.429.754.443**
07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 Orang/bulan	7.429.754.443	DAU		55 Orang/bulan	7.429.754.443
07	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100 %**	**107.777.400**	**DAU**		**100 %**	**183.471.400**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.866.000	DAU		1 Paket	25.000.000
07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	23.471.400	DAU		1 Paket	23.471.400
07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	19.645.000	DAU		1 Paket	30.000.000
07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	10.272.000	DAU		1 Paket	20.000.000
07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	34.500.000	DAU		12 Laporan	75.000.000
07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	9.023.000	DAU		12 Dokumen	10.000.000
07	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**1.199.169.000**	**DAU**		**100 %**	**1.165.000.000**
07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	470.000.000	DAU		1 Laporan	450.000.000
07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	10.626.000	DAU		12 Laporan	15.000.000
07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	718.543.000	DAU		12 Laporan	700.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**281.393.098**	**DAU**		**100 %**	**550.000.000**
07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		37 Unit	190.213.098	DAU		37 Unit	250.000.000
07	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	91.180.000	DAU		1 Unit	300.000.000
07	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase capaian Standart Pelayanan Minimal BLUD**		**100 %**	**75.000.000**	**DAU**		**100 %**	**75.000.000**
07	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	80.000.000	DAU		1 Unit Kerja	75.000.000
07	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**100 %**	**23.927.000**	DAU		**100 %**	**29.500.000**
07	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Prosentase lembaga/ perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**100 %**	**23.927.000**	**DAU**		**100 %**	**29.500.000**
07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen	14.770.000	DAU		1 Dokumen	18.000.000
07	02	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		5 orang	9.157.000	DAU		5 orang	11.500.000
07	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**65 %**	**3.455.136.300**	**DAU,**		**65 %**	**1.954.565.402**
07	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Prosentase Peserta lulus Peatihan Berdasarkan Unit**		**90 %**	**3.372.973.900**	**DAU**		**90 %**	**1.867.330.652**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kompetensi							
07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		464 Orang	3.368.286.800	DAU		464 Orang	1.857.330.652
07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		1 Lembaga	4.687.100	DAU		1 Lembaga	10.000.000
07	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Prosentase pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**50 %**	**13.000.000**	**DAU**		**50 %**	**13.103.900**
07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		60 lembaga	13.000.000	DAU		60 lembaga	13.103.900
07	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Prosentase perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**		**49 %**	**5.031.550**	**DAU**		**49 %**	**10.000.000**
07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegras	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		5 Perizinan	5.031.550	DAU		5 Perizinan	10.000.000
07	**03**	**2.04**		**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		**100 %**	**40.716.900**	**DAU**		**100 %**	**40.716.900**
07	03	2.04	01	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		40 perusahaan	40.716.900	DAU		40 perusahaan	40.716.900
07	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas**	**Prosentase pengukuran produktivitas tingkat daerah**		**10 %**	**23.413.950**	**DAU**		**10 %**	**23.413.950**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten/ Kota**							
07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1 Dokumen	23.413.950	DAU		1 Dokumen	23.413.950
07	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**70,85 %**	**274.752.000**	DAU		**70,85 %**	**274.752.500**
07	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antar Kerja**		**100 %**	**26.404.000**	**DAU**		**100 %**	**26.404.500**
07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		40 Orang	7.013.000	DAU		40 Orang	7.013.500
07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		500 Orang	8.549.500	DAU		500 Orang	8.549.500
07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		100 Orang	1.865.500	DAU		100 Orang	1.865.500
07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		16 Orang	8.976.000	DAU		16 Orang	8.976.000
07	**04**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**9.678.500**	**DAU**		**100 %**	**9.678.500**
07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi		12 Lembaga	4.831.500	DAU		12 Lembaga	4.831.500

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		30 Lembaga	4.847.000	DAU		30 Lembaga	4.847.000
07	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**100 %**	**198.683.000**	**DAU**		**100 %**	**198.683.000**
07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		12 Dokumen	4.906.000	DAU		12 Dokumen	4.906.000
07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1500 Orang	7.465.000	DAU		1500 Orang	7.465.000
07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		500 orang	186.312.000	DAU		500 orang	186.312.000
07	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI**		**100 %**	**39.986.500**	**DAU**		**100 %**	**39.986.500**
07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		10 orang	22.928.000	DAU		10 orang	22.928.000
07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		500 Orang	3.655.500	DAU		500 Orang	3.655.500
07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		10 Orang	13.403.000	DAU		10 Orang	13.403.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**90 %**	**109.697.450**	**DAU**		**90 %**	**109.699.150**
07	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan (PP)**		**40 %**	**23.012.800**	**DAU**		**40 %**	**32.000.000**
07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaa	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		5 Perusahaan	3.837.900	DAU		5 Perusahaan	7.000.000
07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		2 Perusahaan	2.610.200	DAU		2 Perusahaan	5.000.000
07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		25 Laporan	16.564.700	DAU		25 Laporan	20.000.000
07	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial**		**100 %**	**86.684.650**	**DAU**		**100 %**	**172.600.000**
07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		25 Perkara	13.822.050	DAU		25 Perkara	21.750.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		25 Perkara	9.976.600	DAU		25 Perkara	15.450.000
07	05	2.02	03	Penyelenggaraan verifikasi danrekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi		15 Asosiasi dan SP	6.404.000	DAU		15 Asosiasi dan SP	10.000.000
07	05	2.02	04	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/ kota	Jumlah LKS Tripartityang dibina		1 lembaga	42.419.600	DAU		1 lembaga	100.000.000
07	05	2.02	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraa pekerja		100 orang	14.062.400	DAU		100 orang	25.400.000
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					DAU			
32				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					DAU			
32	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Prosentase Transmigran yang ditempatkan**		**100 %**	**39.680.500**	DAU		**100 %**	**39.680.500**
32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigrasi		100 %	39.680.500	DAU		100 %	39.680.500

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	9.922.000	DAU		1 Laporan	9.922.000
32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		1 Kepala Keluarga	29.758.500	DAU		1 Kepala Keluarga	29.758.500

Sumber Data : RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2026

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, serta sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti berikut:

1. Pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sebesar Rp 12.924.032.691,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
2. UPTD Ganesha Technopark Sukowati Sragen, mengelola anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari pendapatan BLUD.
3. Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja ini mewajibkan konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan segenap *stakeholders* untuk melaksanakan rencana kerja ini.
4. Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat Rencana Kerja ini dibuat, baik yang bersifat memperlambat maupun mempercepat pencapaian sasaran kinerja, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2026 ini disusun dan ditetapkan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sragen, 03 Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN

AGUS WINARNO, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19710313 199803 1 008

DEFINISI OPERASIONAL

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

   Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

c. AKAD

   AKAD adalah singkatan dari daerah Antar Kerja Antar Daerah

d. AKAN

   AKAN adalah singkatan dari Antar Kerja Antar Negara

e. AKL

   AKL adalah singkatan dari Antar Kerja Lokal

f. CPMI/ PMI

   CPMI/ PMI adalah singkatan dari Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia

g. P3MI

   P3MI adalah singkatan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

h. BLUD

   BLUD adalah singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah

i. UPTD

   UPTD singkatan dari Unit Pengelola Teknis Daerah